

buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Wajah Baru JFX
Menatap 2015**

**PLKA Sebagai Klinik Bisnis
& Analisis Harga Komoditi**

**Bappebti Tuntaskan
Revitalisasi 5 PLKA**

**17 Tahun Perdagangan
Berjangka Komoditi**



DAFTAR ISI

Berita Utama.....	4-9
- 17 Tahun Perdagangan Berjangka Komoditi	
- UPTP II Reformasi Birokrasi Bappebti	
Berjangka.....	10-11
- Wajah Baru JFX Menatap 2015	
Pasar Lelang.....	12-13
- Bappebti Tuntaskan Revitalisasi 5 PLKA	
Agenda Foto.....	14-15
Aktualita.....	16-17
- Menjadi Bursa Kelas Internasional, BKDI Berniat Jual Sahamnya	
- JFX Center Hadir di UKWK	
- Pembentukan AIPB Molor Hingga 2015	
- Juni 2016 ITRC Bentuk Pasar Fisik Karet	
Analisa.....	18
Breaking News.....	19
Info SRG.....	20-21

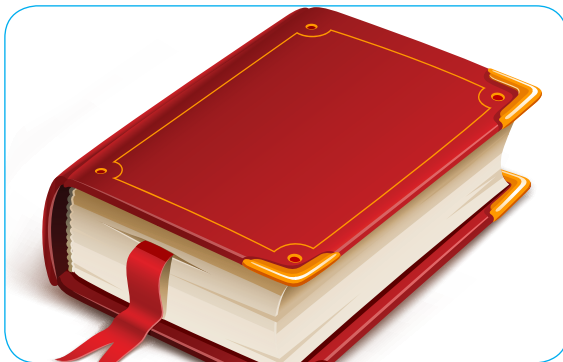
Kiprah...26-27

WPB Millenium Multi Talenta



Forum...22

Subjek Kontrak Berjangka



Kolom...23-25

Optimalisasi Gudang SRG Untuk Pengembangan PBK



Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



Buletin Bappebti

BUKUAN HARGA & PERDAGANGAN KOMODITI

Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggujawab Jawab

Sutiriono Edi

Pemimpin Redaksi

Sri Nastiti Budianti

Wakil Pemimpin Redaksi

Taufik K.S

Dewan Redaksi

Subagiyo, Saleh Abich, Himawan
Purwadi, Yuli Edi Subagio, Annisa F.
Wulandari, Poppy Juliyanti, Yovian Andri
P., Tomi Setiawan

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Gita Regina
Napitupulu

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:

buletin@bappebti.go.id



Foto : Sekjen Kemendag, Gunaryo, menekan tombol peluncuran UPTP II Bappebti bersama Kepala Bappebti, Sutiriono Edi dan Sekretaris Bappebti, Sri Nastiti Budianti.

Tak terasa, saat ini sudah di penghujung tahun 2014. Sepanjang tahun 2014 ini tentunya ada banyak hal yang sudah dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai 'cerminan untuk menatap terbitnya matahari' di tahun 2015 mendatang. Sikap optimis tentu harus diutamakan untuk membuktikan bahwa hari esok lebih baik dari masa lalu.

Pada 5 Desember 2014, lalu, ada peristiwa penting di industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia, yakni Bappebti menetapkan setiap tanggal 5 Desember diperingati sebagai hari perdagangan berjangka komoditi Indonesia.

Latar belakang ditetapkannya 5 Desember sebagai hari perdagangan berjangka komoditi Indonesia didasarkan terbitnya UU No. 32 Tahun 1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, yang jatuh pada 5 Desember 1997.

Sekitar dua tahun kemudian, tepatnya 27 September 1999, pemerintah menetapkan Bappebti selaku otoritas pengawas dan pembina industri perdagangan berjangka komoditi, sesuai Keputusan Presiden No. 115 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2001.

Penetapan 5 Desember sebagai hari perdagangan berjangka komoditi Indonesia, tampaknya cukup beralasan sebagai salah satu sarana efektif atau momentum mengukur tingkat kinerja industri dan mempererat barisan para pelaku usaha. Dan budaya ini harus lah dipelihara sehingga menciptakan kecintaan terhadap industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air.

Moment peringatan 17 tahun perdagangan berjangka komoditi Indonesia juga dimanfaatkan Bappebti meluncurkan pelayanan

perizinan secara on-line yang dikenalkan dengan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan II (UPTP II). UPTP II itu melayani perizinan dan non perizinan di bidang PBK, SRG dan PLK.

10 hari kemudian, tepatnya pada 15 Desember 2014, Jakarta Futures Exchange- JFX juga memperingati 14 tahun *first trading day*-perdagangan perdana JFX yang jatuh pada 15 Desember 2000. Pada perayaan itu, ada sejumlah data kinerja dan rencana ke depan yang diungkapkan manajemen JFX.

Dari perhelatan itu, JFX juga meluncurkan logo barunya. Perubahan logo dilakukan dalam rangka memberikan semangat dan citra baru bagi kemajuan JFX di masa mendatang.

Sementara itu, di bidang pasar lelang komoditi agro- PLKA, Bappebti telah menuntaskan revitalisasi lima pasar lelang, yakni pasar lelang Jateng, Bali, Jatim, Jabar dan Sulsel. Revitalisasi pasar lelang itu dimaksudkan untuk menjadikan pasar lelang sebagai institusi bisnis yang mandiri dan profesional, sehingga PLKA dapat berkontribusi meningkatkan daya saing komoditi Indonesia di kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 mendatang. Di sisi lain, revitalisasi PLKA itu menciptakan pasar komoditi di dalam negeri yang efisien, transparan dan *fair*.

Pada akhirnya, Redaksi juga mengucapkan Selamat Natal bagi yang merayakannya dan Selamat Tahun 2015. Semoga hari baru di tahun 2015 membawa berkah dan kesuksesan bagi kita semua. Amin.

Salam!!!



17 Tahun Perdagangan Berjangka Komoditi

Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, memotong tumpeng didampingi pejabat Eselon II Bappebti.

***"Jasmerah,
jangan sekali-
kali melupakan
sejarah," demikian
disampaikan
Presiden Soekarno
dalam sebuah pidato
kenegaraan di tahun
1966.***

Ungkapan itu dipinjam Kepala Bappebti- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Sutriyono Edi, dalam sambutannya memperingati ulang tahun ke-17 terbitnya Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia dan kilas balik perjalanan Bappebti sejak awal dirintis.

UU No. 32 Tahun 1997, resmi diterbitkan pemerintah pada 5 Desember 1997, sebab itu pada 5 Desember 2014, lalu, Bappebti juga meresmikan setiap tanggal 5 Desember diperingati sebagai

Hari Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

"Bappebti lahir dari sebuah cita-cita dan idealisme untuk menjadikan negara Indonesia yang kaya raya agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Berlimpahnya kekayaan alam dan mineral Indonesia menjadikan Indonesia dijajah selama ratusan tahun. Namun meraih kemerdekaan tidak serta merta memberikan jaminan kemakmuran kepada rakyat Indonesia," kata Sutriyono Edi, dalam Acara Ulang Tahun ke-17 Perdagangan Berjangka di Indonesia, 5 Desember 2014, di Kantor Bappebti,



Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Sutriyono, juga memaparkan tentang awal perjalanan industri PBK dan perjalanan Bappebti sejak awal dirintis. Dia mengatakan, rencana pemerintah Indonesia untuk mendirikan Bursa Berjangka sudah dirintis sejak lama. Pada tahun 1979, rencana ini mulai dibahas secara intensif dalam Tim Interdepartemen Persiapan Bursa Komoditi Indonesia. pada akhirnya tim itulah yang menyusun rancangan peraturan pemerintah mengenai bursa komoditi yang mencakup perdagangan multi komoditi.

Kemudian pada periode 1982, dibentuklah bursa komoditi Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1982, tentang Bursa Komoditi pada tanggal 2 Desember 1982. Berdasarkan PP tersebut dan PP No. 80 Tahun 1982 tentang Pendirian dan Pokok-Pokok Organisasi Bursa Komoditi, maka ditetapkan bahwa penyelenggaraan bursa Komoditi di Indonesia hanya dilakukan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti).

"Jadi, bursa komoditi Indonesia diresmikan pada bulan Januari 1985 dan dikelola oleh Bapebti dengan lembaga penjaminnya PT. Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi," ujar Sutriyono Edi.

Setelah melalui proses panjang, maka UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK terbit pada tanggal 5 Desember 1997, dan menugaskan Bappebti melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

PT Bursa Berjangka Jakarta secara resmi mendapatkan izin usaha penyelenggaraan Bursa Berjangka pada tanggal 21 November 2000. Pada tahun 2009, Bappebti kembali memberikan izin usaha Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka kepada PT. Bursa Komoditas dan Derivatives Indonesia (BKDI) dan PT. Identrust Securities International (ISI).

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 1997 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan PBK, oleh karena itu diterbitkan UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK.

Beberapa ketentuan-ketentuan perubahan yang terdapat dalam amandemen UU No. 10 Tahun 2011 adalah mengenai Subyek Komoditi, Sistem Perdagangan Alternatif, Kewajiban Pelaporan dan Pendaftaran Transaksi SPA, Demutualisasi Bursa Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Transaksi Melalui Sarana Perdagangan Elektronik.

"Setelah kita melakukan kilas balik

perdagangan berjangka di Indonesia, harus disadari bahwa PBK masih belum dapat mencapai harapan yang dicita-citakan di awal pembentukannya. PBK sangat strategis di dalam perekonomian nasional di era perdagangan bebas saat ini karena peranannya sebagai sarana lindung nilai (hedging), sarana pembentukan harga (price discovery) dan alternatif investasi yang sangat diperlukan bagi pelaku usaha untuk melindungi usahanya," kata Sutriyono.

Namun, lanjutnya, selama 17 tahun dirasakan belum berjalan optimal. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara produsen utama beberapa komoditi di dunia sekaligus pemasok utama beberapa komoditi primer seperti CPO, kakao, karet, kopi dan batubara. Transaksi di Bursa Berjangka saat ini, ungkapnya, masih didominasi oleh transaksi SPA (Sistem Perdagangan Alternatif), sehingga masih belum dapat mewujudkan apa yang dicita-citakan didalam Undang-Undang PBK.

"Pemerintahan baru menuntut perubahan ke arah yang lebih baik, oleh karena itu kita harus siap dalam menghadapi tantangan, terus mawas diri, optimis, tetap menjaga integritas, semakin kritis, dan memiliki ide untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik demi mencapai cita-cita menjadikan bursa komoditi sebagai referensi harga dunia dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang ingin berinvestasi di bidang PBK. Kebijakan tidak harus selalu *top-bottom*, melainkan juga *bottom-up*, sehingga tercipta sinergi yang baik," paparnya.

Dia juga berpesan, "Mari menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dapat menjaga reputasi, integritas dan kepercayaan publik dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang tertuang di dalam UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK." 



Kilas Balik Bappebti

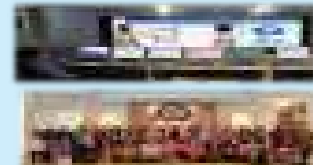
BAPPEBTI MOVING FORWARD



Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti)
2 Desember 1982 – 5 Desember 1997



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
5 Desember 1997 – sekarang



Sejarah Berdirinya Bappebti



- Rencana Pemerintah untuk mendirikan Bursa Komoditi di Indonesia telah lama dirintis melalui Panitia Persiapan Bursa Karet di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1971.
- Semula Pemerintah hanya bermaksud mendirikan bursa karet, yang diilhami oleh hasil sidang *Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)* di Yogyakarta tahun 1970.
- Pada tahun 1979 rencana Pemerintah ini mulai dibahas secara intensif dalam Tim Interdepartemental Persiapan Bursa Komoditi Indonesia, yang telah berhasil menyusun rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Bursa Komoditi yang mencakup perdagangan multi komoditi.
- Pembentukan Bursa Komoditi Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1982 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1982 tanggal 2 Desember 1982 tentang Bursa Komoditi.

- Struktur organisasi BAPPEBTI yang terakhir terdiri dari seorang Kepala yang didukung oleh Sekretarisat dan 4 (empat) Biro yaitu Biro Hukum, Biro Perniagaan, Biro Analisis Pasar serta Biro Pasar Fisik dan Jasa.

- Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 1997, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Oleh sebab itu diterbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Begitu pula Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dirasakan perlu dilakukan amandemen, untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Maka pada bulan Agustus 2011 diterbitkan Undang-undang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

- Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengurangi campur tangan di bidang komoditi dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar, mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 5 Desember 1997, yang menugaskan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka.

- Secara kelembagaan, Bappebti yang ada sekarang sebenarnya adalah merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti).

- Bappebti (dengan 2 "P") secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 115 Tahun 1999 dengan struktur organisasi BAPPEBTI terdiri dari seorang Kepala yang didukung oleh Sekretarisat dan 3 (tiga) Biro yaitu Biro Hukum, Biro Perniagaan dan Biro Analisis Pasar



Gedung Kantor Bapebti/ Bappebti



Thn 1983- 1999
Gedung Bursa Lantai 2 - 4
Jl. Merdeka Selatan No. 14
Jakarta Pusat



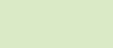
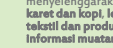
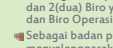
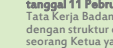
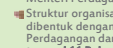
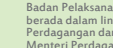
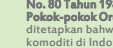
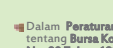
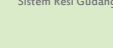
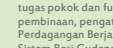
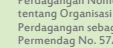
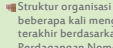
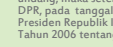
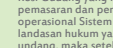
Thn 1999- 2000
Gedung Garuda Lantai 2 dan 15
Jl. Merdeka Selatan No. 13
Jakarta Pusat



Thn 2000- April 2009
Bumi Caya Plaza Lantai 4
Jl. Imam Bonjol No. 62
Jakarta Pusat



April 2009- sekarang
Gedung Kementerian Perdagangan
Lantai 3 - 5
Jl. Kuningan Raya No. 172
Jakarta Pusat



- Selain melakukan melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka, Bappebti diberikan tugas tambahan untuk mengembangkan kegiatan Pasar Lelang serta Sistem Resi Gudang yang mendukung mekanisme pemasaran dan pembiayaan yang pro pasar. Karena operasional Sistem Resi Gudang memerlukan landasan hukum yang kuat dalam bentuk Undang-undang, maka setelah melalui proses pembahasan di DPR, pada tanggal 14 Juli 2006 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

- Struktur organisasi dan uraian tugas Bappebti telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dan terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 57/M-DAG/PER/8/2012, dimana tugas pokok dan fungsi Bappebti adalah melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang.

- Dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1982 tentang Pendirian dan Pokok-pokok Organisasi Bursa Komoditi, ditetapkan bahwa penyelenggaraan bursa komoditi di Indonesia hanya dilakukan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) yang berada dalam lingkungan Departemen Perdagangan dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

- Struktur organisasi Bappebti pertama kali dibentuk dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 152/KP/II/1983 tanggal 11 Februari 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Bursa Komoditi dengan struktur organisasi BAPPEBTI terdiri dari seorang Ketua yang didukung oleh Sekretarisat dan 2 (dua) Biro yaitu Biro Pengembangan Pasar dan Biro Operasi.

- Sebagai badan pelaksana, Bappebti menyelenggarakan kegiatan perdagangan fisik karet dan kopi, lelang pengalihan hak kuasa tektel dan produk tektel serta penyediaan informasi muatan dan ruang kapal.

Tim 11 Pendahulu Bapebti



On Job Training di Amerika Serikat, Thn 1983



Menteri Perdagangan Era Bapebti/Bappebti



Ketua Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti)



Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)



Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)



Menteri Perdagangan Era Bapebti/Bappebti

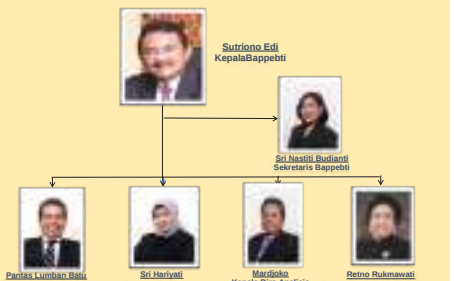


Sekretaris Bapebti/Bappebti



Struktur Organisasi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Per Juli 2014



Pembahasan dan Penandatanganan RUU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Desember 1997



pengambilan keputusan dan pengesahan dua RUU yaitu RUU tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Selasa, (19 Juli 2011)

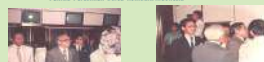


Kegiatan Bapebti

Pertemuan JHRK Tahun 1989



Pertemuan Bursa Komoditi Indonesia Januari 1985



Memori



Memori





UPTP II Reformasi Birokrasi Bappebti

Bappebti meluncurkan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan II (UPTP II) untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang PBK, SRG dan PLK.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu aspek dari reformasi birokrasi. Pada dasarnya, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Kepala Bappebti- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Sutriyono Edi, dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, saat ini, pelayanan publik merupakan agenda yang strategis dan menjadi prioritas yang harus diwujudkan oleh setiap lembaga negara.

Untuk ikut mensukseskan agenda tersebut, Jumat 5 Desember 2014,

Bappebti, meresmikan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) II di Gedung Bappebti, Jakarta. UPTP II merupakan pelayanan publik secara terpadu satu pintu sehingga dapat memangkas waktu perizinan, lebih transparan, mengurangi biaya, dan lebih profesional.

"Dengan pelayanan terpadu, maka proses pelayanan publik menjadi lebih profesional, efektif, efisien, transparan, tepat waktu, dan responsif," tutur Sutriyono, dalam sambutannya saat launching UPTP II, 5 Desember 2014, lalu.

Sutriyono Edi bilang, Bappebti ingin memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih mudah kepada para pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi



(PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). "Proses pelayanan terpadu perdagangan dilakukan dan dilayani dalam satu sistem pelayanan terpadu melalui satu pintu, baik secara *online* maupun manual," terangnya.

Melalui pelayanan terpadu ini, ujarnya, proses pelayanan akan menjadi lebih cepat karena adanya pemangkasan waktu proses perizinan, dan beberapa di antaranya dilakukan secara online melalui INATRADE. Tidak diperlukan proses tatap muka, sehingga mengurangi biaya karena bisa diakses dari mana saja secara online. "Pada saat proses juga tidak dikenakan biaya, serta transparan karena bisa dipantau secara langsung melalui internet."

Kemudahan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan khususnya di Bappebti, lanjut Sutriyono, merupakan upaya penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan serta perbaikan fungsi agar pelayanan yang diberikan kepada publik dapat dilaksanakan dengan baik, tertib, transparan, dan terprediksi (*good governance*), yang proses pengelolaannya dilakukan dan dilayani dalam satu sistem pelayanan secara terpadu.

"Tujuannya agar dapat terselenggaranya pelayanan publik yang prima di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas sehingga pelayanan yang diberikan lebih cepat, tepat dan lebih mudah kepada para pelaku usaha," paparnya.

Pelayanan terpadu ini, terangnya, juga merupakan langkah konkret dari visi dan misi besar Kementerian Perdagangan yang ingin menciptakan iklim usaha perdagangan yang kondusif dan menyelenggarakan pelayanan perizinan secara profesional.

"Hal itu sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan, penyelenggaraan pelayanan perdagangan secara terpadu kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka meningkat-

kan kualitas dan menjamin tersedianya pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perdagangan," jelasnya.

Peluncuran UPTP II ini, sekaligus melengkapi pelayanan perizinan perdagangan yang telah ada di UPTP I pada kantor pusat Kementerian Perdagangan; UPTP III pada Gedung Direktorat Pengembangan Mutu Barang, Ciracas; dan UPTP IV pada Gedung Direktorat Metrologi, Bandung.

Metode Online

Layanan UPTP II meliputi pemberian legalitas usaha di sektor PBK, SRG dan PLK. Diantaranya, berupa izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan dan pendaftaran. Sedangkan non perizinan yang dilakukan meliputi pemberian informasi, konsultasi, dan pelayanan lain selain perizinan di sektor perdagangan.

Dalam pelayanan publik di UPTP II, Kepala Bappebti akan bertindak selaku penanggung jawab operasional dan koordinator pelaksana pada UPTP II dibantu oleh Sekretaris Bappebti sebagai penanggung jawab harian.

Menurut Sutriyono Edi, pelayanan perizinan di Bappebti terdiri atas 18 jenis perizinan. Izin Wakil Pialang Berjangka dan Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka akan menggunakan metode *online* pada 15 Desember 2014. "Sedangkan 16 jenis perizinan lain masih menggunakan metode pelayanan manual dan prosesnya masih membutuhkan verifikasi serta validasi data dari unit teknis di Bappebti."

Untuk sementara ini, tambah Sutriyono, ruang UPTP II masih berada di lantai III dan rencananya pada tahun 2015 akan disiapkan ruangan yang permanen dan lebih luas di lantai II Gedung Bappebti.

Dia juga menjelaskan, untuk perizinan lainnya yaitu, Izin Usaha Penasihat Berjangka, Izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka, Izin Wakil Penasihat Berjangka dan Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka belum dapat dilaksanakan. Pasalnya, kegiatan Sentra Dana Berjangka dan Penasihat Berjangka belum dilaksanakan. 

18 Perizinan Bappebti

1. Izin Wakil Pialang Berjangka
2. Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka
3. Izin Usaha Bursa Berjangka
4. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka
5. Izin Usaha Pialang Berjangka
6. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang berjangka
7. Persetujuan Pialang PALN
8. Persetujuan Bank Penyimpan Margin
9. Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi
10. Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka untuk Melakukan Kegiatan Kliring
11. Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Komoditi Terorganisir Persetujuan Pialang Peserta SPA
12. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
13. Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang SRG
14. Persetujuan Sebagai Gudang SRG
15. Persetujuan Sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian
16. Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi (Pusreg) dalam Sistem Resi Gudang
17. Persetujuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi dengan Penyerahan Kemudian (Forward).
18. Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward).



Wajah Baru JFX Menatap 2015

Transaksi kontrak multilateral JFX di tahun 2014 naik sebesar 22 %, dan di tahun 2015 ditargetkan tumbuh 25 %. Pergantian logo JFX diyakni menjadi spirit baru peningkatan kinerja dan menciptakan pasar komoditas yang kompetitif di dalam negeri.

Tepat 15 Desember 2014, Jakarta Futures Exchange (JFX) telah beroperasi selama 14 tahun. Sepanjang 14 tahun tersebut, JFX menawarkan berbagai produk yang diminati para pelaku pasar, seperti kontrak berjangka berbasis komoditi olein, emas, kopi, dan kakao. Di samping itu, JFX juga menawarkan perdagangan fisik komoditi karet dan batubara.

Dari kacamata otoritas perdagangan berjangka komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti menaruh apresiasi atas upaya yang dilakukan JFX. Sejak tahun 2011, lalu, volume perdagangan komoditi yang masuk dalam kelompok kontrak berjangka multilateral JFX terus

menunjukkan pertumbuhan positif.

Menurut Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu, dalam acara 14 Tahun beroperasinya JFX dan peresmian logo baru di Kantor JFX, Jakarta, pada 15 Desember 2014 lalu, volume transaksi kontrak multilateral JFX di tahun 2011 hingga 2013 meningkat, di mana volume transaksi meningkat sebesar 141,52 % dan 72,39 % secara berturut-turut.

"Kami sangat berharap di masa mendatang kinerja kontrak berjangka JFX semakin berkembang, seiring dengan besarnya kebutuhan *risk manajemen* ditataran perekonomian Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia dan dunia," kata Pantas Lumban Batu.

Sementara itu, Direktur Utama JFX,

Sherman Rana Kreshna, mengatakan, transaksi multilateral hingga akhir tahun 2014 diperkirakan menembus angka 400.000 lot, atau naik sebesar 22 % dari 326.985 lot pada tahun 2013. Adapun produk yang paling banyak diperdagangkan di tahun 2014 yaitu Kontrak Berjangka Kopi yang sampai dengan November 2014 tercatat sebesar 169.644 lot atau 47 % dari keseluruhan transaksi multilateral. Sedangkan kontrak berjangka emas tercatat sebesar 104.419 lot per November 2014 naik 29 % dari keseluruhan transaksi. Untuk Olein dan Kakao masing-masing tercatat sebesar 12,80 % dan 11,20 % dari keseluruhan transaksi multilateral.

"Kontrak berjangka emas dengan



ukuran kecil 100 gram (GOLD 100) paling diminati pelaku usaha maupun investor,” ungkap Sherman. Per November 2014, GOLD 100 mencatat kenaikan transaksi yang signifikan menjadi 43.200 lot atau naik 151 % dari 17.237 lot pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, Kontrak Gulir Emas (KGE) naik dari 735 lot di bulan November 2013 menjadi 3.354 lot di November 2014 atau tumbuh 356 %.

SPA Turun 21 %

Di sisi lain diungkapkan Sherman Rana Kreshna, di tahun 2014 JFX telah meluncurkan sebanyak 3 produk baru, yaitu Kontrak Fisik Batubara, Kontrak Berkala Emas, dan Kontrak CFD-*contract for difference* yang mencakup kontrak forex, indeks, *single stock* dan komoditi.

“Kontrak fisik batubara merupakan transaksi lelang *online* batubara melalui JFX yang diperdagangkan pada kuartal III tahun 2014. Saat ini, penjual batubara adalah PT Bukit Asam Batubara (PTBA), hingga saat ini telah tercatat ada sebanyak 75 ribu ton batubara ditransaksikan secara *online*. Pada akhir Desember nanti, direncanakan PTBA akan membuka kembali penawaran lelang *online* batubaranya melalui JFX,” bebernya.

Adapun Kontrak Berkala Emas (KBE) yang dipasarkan untuk market retail karena ukuran *sizenya* yang relatif kecil yaitu 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram masih beradaptasi dengan pasar berjangka. Transaksi KBE masih relatif kecil yaitu 520 lot sejak diluncurkan pada bulan September yang lalu. “Spesifikasi produk sedang dilakukan kajian ulang terutama untuk mempersingkat waktu serah (*delivery time*),” jelasnya.

Untuk transaksi kontrak bilateral atau Sistem Perdagangan Alternatif- SPA, kata Sherman, pada akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai 3.300.000 lot atau mengalami penurunan 21 % dari 4.195.277,7 lot pada tahun 2013.

Menurut Sherman, penurunan volume transaksi SPA disebabkan beberapa

faktor. Dari faktor eksternal, secara global perdagangan produk-produk *over the counter*- OTC memang cenderung menurun disebabkan tidak adanya pergerakan harga yang fluktuatif. Kalau harga-harga OTC tidak fluktuatif maka pasar cenderung stagnan. Sedangkan faktor dari internal, kita ketahui sepanjang tahun 2014 merupakan tahun politik. Sehingga konsentrasi para pelaku pasar setidaknya mempengaruhi minat berinvestasi.

“Tetapi kami tetap optimis untuk tahun mendatang kontrak SPA akan kembali diminati para pelaku pasar. Karena kondisi itu sifatnya hanya temporeri,” ujar Sherman.

Target 2015

Sherman memprediksi, pada tahun 2015 transaksi perdagangan di JFX akan semakin bergairah. Pasalnya, kebijakan *stick & carrot* dari Bappebti agar para pialang memenuhi persyaratan minimal transaksi multilateral sebesar 5 % akan memberi dampak positif bagi peningkatan transaksi multilateral. “Kontrak multilateral di tahun depan kami targetkan meningkat mencapai 25 % atau naik menjadi 500.000 lot,” ucapnya optimis.

Sedangkan, untuk kontrak SPA diperkirakan tembus 5.000.000 lot pada tahun 2015 atau naik sebesar 51,5 % dibandingkan tahun 2014. “Peningkatan kontrak SPA didukung oleh kenaikan transaksi produk CFD,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Sherman mengatakan, ada beberapa strategi yang akan dilakukan. Diantaranya, terus meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, melakukan pendekatan kepada anggota bursa maupun *market maker*, sosialisasi dan edukasi termasuk optimalisasi JFX center di kampus-kampus, kerjasama dengan bursa berjangka di luar negeri serta penambahan anggota bursa baru.

Selain itu, Sherman juga membeberkan, JFX akan meluncurkan kontrak baru pada tahun 2015. Kontrak baru

tersebut, diantaranya, *Indonesian Government Bond Futures*- IGBF, Kontrak Fisik Teh, dan Kontrak Fisik Kakao. “Untuk kajian-kajian baru terhadap kontrak komoditi masih terus dilakukan JFX dan mengikuti perkembangan pasar dan kebutuhan pasar lokal maupun global,” terangnya.

“Untuk sistem IT perdagangan akan diperluas ke *end-user*, sehingga *end-user* akan semakin mudah menggunakan aplikasi yang sudah ada,” tambah Sherman.

Sementara dalam rangka mengembangkan perusahaan termasuk dalam upaya menghadapi pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN, JFX pada tahun 2015 siap menambah modal disetor dari Rp 11,6 miliar menjadi Rp100 miliar. Tambahan modal tersebut dilakukan paling lambat pada pertengahan tahun 2015.

“Penambahan modal disetor ini akan membuka peluang munculnya investor baru baik lokal maupun asing yang berminat memiliki JFX,” ujarnya.

Logo Baru

Bertepatan dengan 14 tahun beroperasi, JFX juga meluncurkan logo barunya. Menurut Sherman, perubahan logo dilakukan dalam rangka memberikan semangat dan citra baru bagi kemajuan JFX di masa mendatang.

“Hari ini bukan hari ulang tahun JFX, tapi *first trading day*. Bertepatan dengan acara ini, kami juga mengubah logo JFX menjadi logo baru perusahaan yang lebih dinamis, modern, dan menggambarkan keberlangsungan usaha perusahaan yang *moving forward*,” papar Sherman.

Lebih lanjut, dia mengatakan, logo baru didasari semangat dinamika modernisasi. Banyak perusahaan melakukan pergantian logo untuk bisa memberi pencerahan. “Garis emas melambangkan inovasi, arti kuning sendiri merupakan filosofi kemakmuran. Sedangkan simbol tanda panah di huruf X yang warnanya gold, itu diartikan *moving power progress*, lebih dinamis inovatif. Kita bergerak menuju kesuksesan,” pungkash Sherman Rana Kreshna.



Bappebti Tuntaskan Revitalisasi 5 PLKA

5 pasar lelang komoditi agro yang selama ini diselenggarakan pemerintah daerah, pada akhir tahun 2014 resmi direvitalisasi. Sisanya kapan menyusul?

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti sebagai pembina dan regulator pasar lelang komoditi agro- PLKA sejak tahun 2010 menggagas program revitalisasi pasar lelang yang jumlahnya sebanyak 13 PLKA di tanah air. Secara bertahap, program revitalisasi pasar lelang itu dimulai dengan sebanyak lima daerah, yakni pasar lelang Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan.

Menurut Kepala Bappebti, Sutriono Edi, revitalisasi pasar lelang kini lebih mengedepankan kemandirian dan profesionalisme. "Diharapkan revitalisasi ini akan membentuk lembaga penyelenggara pasar lelang yang mampu melihat peluang bisnis dalam mengembangkan pasar lelang sebagai suatu unit bisnis yang mendukung pemasaran komoditas di Indonesia," katanya, saat penyerahan persetujuan penyelenggaraan pasar lelang kepada Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat, di Bandung, Kamis 18 Desember 2014.

"Revitalisasi pasar lelang yang ada saat ini adalah sebuah kebutuhan yang harus dilakukan dalam meningkatkan daya saing petani dan berkompetisi dengan komoditi yang dihasilkan daerah lain," jelas Sutriono Edi.

Dan dalam perspektif lain, tambahnya, di akhir tahun 2015 nanti akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN- MEA, yang berarti komoditi dari negara-negara anggota ASEAN bisa dipasarkan di tanah air dan demikian sebaliknya. Sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, maka revitalisasi pasar lelang adalah salah satu strategi meningkatkan mutu dan kualitas komoditi yang dihasilkan para petani.

Di samping itu, dengan revitalisasi pasar lelang, penyelenggaraan PLKA akan diserahkan dari dinas yang membidangi perdagangan kepada pihak swasta, koperasi ataupun BUMD. Sehingga diharapkan PLKA ke depannya dapat mandiri dan profesional.

"Mandiri mempunyai arti penyelenggaraan dilakukan

tanpa dukungan dari APBN atau APBD. Profesional mempunyai arti penyelenggaraan pasar lelang dilakukan oleh pihak swasta atau lembaga koperasi, sehingga pengembangan pasar lelang dapat dilakukan secara optimal. Sedangkan dinas yang membidangi perdagangan akan fokus pada pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pasar lelang," tutur Sutriono Edi.

Revitalisasi PLKA juga akan menerapkan sistem penjaminan yang bertujuan menjamin penyelesaian atas transaksi yang terjadi dan mengurangi resiko terjadinya gagal serah atau gagal bayar. Dalam pelaksanaannya, setiap penjual dan pembeli diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah dana jaminan sebelum melakukan transaksi.

"Dengan sistem penjaminan itu, penyelenggara pasar lelang diharuskan kerjasama dengan pihak perbankan. Nantinya bank akan menyimpan dana jaminan transaksi, dan juga bisa menjadi sarana transaksi jual-beli komoditas dari pasar lelang. Jadi, dengan revitalisasi pasar lelang ini akan membuat efisien para pelakunya. Pembeli komoditi tidak perlu menyediakan uang dalam jumlah besar, tetapi cukup dilakukan melalui layanan perbankan," ujar Sutriono.

Pasar Lelang Online

Pasar lelang yang dikelola secara profesional membuka peluang bagi penyelenggara untuk melakukan berbagai inovasi perdagangan dengan tujuan komersial dan mendatangkan keuntungan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan seperti menyediakan sarana transaksi pasar lelang secara *online*.

"Dengan pasar lelang *online*, penyelenggara bisa menawarkan berbagai komoditi sepanjang 24 jam sampai ada pembelinya. Jadi, penyelenggaraan pasar lelang tidak lagi berdasarkan waktu yang ditetapkan. Dengan demikian para petani pun bisa lebih efisien dalam menawarkan komoditi melalui pasar lelang *online*," jelas Sutriono Edi.

Di samping itu, pasar lelang online juga bisa menawarkan komoditi yang sesuai SNI. Sehingga pelaku usaha industri pun bisa mendapatkan komoditi yang dibutuhkan dari pasar lelang. "Seperti komoditi kakao yang dibutuhkan industri pengolahan, bisa saja memperoleh dari pasar lelang asalkan kakao yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi industri,"

tambah Sutriono Edi.

Sejak 27 November 2014, lalu, Bappebti secara berturut-turut menyerahkan persetujuan penyelenggaraan pasar lelang kepada koperasi ataupun BUMD. Pada 27 November lalu, adalah Koperasi Pasar Lelang Komoditi Jateng yang pertama kalinya menerima persetujuan penyelenggaraan pasar lelang dari Bap-

pebti. Kemudian pada 12 Desember 2014, disusul pasar lelang Bali yakni Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Praja, 16 Desember 2014 yakni PT. Puspa Agro (BUMD Jatim), 18 Desember 2014, Koperasi Pasar Lelang Komoditi Jabar, dan pada 23 Desember 2014 yakni Koperasi Pusat Komoditas dan Pasar Lelang Agro, Sulawesi Selatan.

Dr. Ir. Ronnie S. Natawidjaja, Ketua Koperasi Pasar Lelang Komoditi Jawa Barat- KPLKJB, kepada Redaksi Buletin Bappebti, mengatakan, salah satu motivasinya menerima amanah sebagai pengurus KPLKJB adalah pembuktian antara teori dan praktik. Hal itu dikatakan Ronnie S. Natawidjaja karena dalam kesehariannya adalah dosen agribisnis di Univ. Padjajaran, Bandung.

"Selama ini secara teoritis saya sebagai pendidik cukup paham tentang pasar lelang komoditi, baik yang ada di mancanegara maupun yang ada di dalam negeri. Kalau yang ada di mancanegara kita tidak perlu bahas lah, di sana sudah berjalan secara natural. Tetapi pasar lelang komoditi yang ada di dalam negeri masih jauh dari yang diharapkan. Maka ketika ada wacana hendak direvitalisasi, saya secara pribadi sangat mendukung dan hendak berkontribusi bagi pengembangan pasar lelang khususnya yang ada di Jawa Barat," kata Ronnie.

Lebih jauh dikatakan Ronnie, dengan keterlibatannya di KPLKJB dapat dimanfaatkan para mahasiswa khususnya dari Unpad untuk melakukan analisis harga dan komoditi. "Selama ini kita hanya mengetahui harga komoditi di saat tinggi dan rendah, tetapi tidak mengetahui akar penyebab harga komoditi tersebut bisa di posisi tinggi atau pun rendah. Kalau nantinya transaksi komoditi di KPLKJB cukup tinggi, maka kita ataupun mahasiswa bisa melakukan analisisnya. Dan dari analisis itu akan disimpulkan sebuah strategi terhadap komoditi yang dianalisis sehingga para petani atau pun



Dr. Ir. Ronnie S. Natawidjaja, Ketua Koperasi Pasar Lelang Komoditi Jawa Barat-

pedagang bisa melakukan prediksi di masa tanam berikutnya."

"Jadi, nantinya KPLKJB itu dapat berperan sebagai rumah studi analisis harga dan perdagangan komoditi," tegas Ronnie.

Namun demikian, Ronnie berharap hingga satu tahun ke depan KPLKJB masih mendapat dukungan anggaran baik dari Pemda Jawa Barat maupun Kementerian Perdagangan untuk menjalankan program yang sudah dirancang. "Dengan kondisi seperti sekarang, sangat tidak mungkin kami berjalan tanpa dukungan pemerintah. Sebab kami belum memiliki perangkat kerja yang memadai dan operator sebagai pelaksana pasar lelang."

Sementara itu, Ronnie cukup optimis KPLKJB bisa dimanfaatkan para pelaku komoditi unggulan Jawa Barat dengan dilakukannya berbagai pendekatan. "Mulai awal tahun 2015, kami sudah merencanakan melakukan pertemuan dengan petani, asosiasi komoditi,

pedagang dan industri pengguna. Dari pertemuan itu, diharapkan ditemukan strategi untuk menemukan pihak penjual dan pembeli di pasar lelang."

Menurut Ronnie, selain mendapatkan komisi dari transaksi pasar lelang, KPLKJB berpeluang menjalankan bisnis jasa pergudangan, logistik dan perantara.

"Dengan menjalankan bisnis jasa seperti itu, para pelaku akan semakin efisien. Karena mereka tidak perlu memikirkan logistik dan pergudangan, tetapi melalui KPLKJB semuanya sudah dibereskan," jelasnya.

"Sebab itu, tingkat kepercayaan para pelaku komoditi terhadap KPLKJB harus dibangun. Maka ke depan kami pun akan menjalin kerjasama dengan BJB- Bank Jabar Banten, untuk sama-sama melakukan penetrasi pasar," tandas Ronnie S. Natawidjaja.



DPRD Prov Bangka Belitung Kunjungi Bappebti



Kepala Bappebti, Sutriono Edi didampingi Pejabat Eselon II Bappebti menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Bangka Belitung di Gedung Bappebti. Rabu (10/12)

Kedatangan rombongan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, K. Junaidi. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap perdagangan Timah di Bangka Belitung dengan Bappebti.

Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai implementasi Permendag Nomor 44 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah. Selain itu, para anggota panitia kerja juga menyampaikan masukan terkait dengan tata niaga timah di Bangka Belitung.

Bappebti Ajak Pelaku Usaha Rotan Manfaatkan Potensi SRG

Sekretaris Bappebti, Sri Nastiti Budianti memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Rattan One, Cirebon, Kamis (11/12). Sosialisasi dengan tema "SRG sebagai alternatif Pembiayaan bagi Petani dan Pelaku Usaha Rotan dalam Menggerakkan Perekonomian Daerah" diselenggarakan atas kerjasama dengan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI).

Pembicara dalam sosialisasi ini adalah Kepala Bagian Pengawasan SRG Bappebti, Sukardi dan Wakil Ketua Bidang Regulasi dan Sertifikasi AMKRI, Zaenal Arifin.

Sosialisasi mengenai SRG, khususnya untuk komoditi Rotan diselenggarakan di industri hilir rotan untuk memberikan informasi kepada para pelaku usaha mengenai implementasi SRG dalam mendorong industri rotan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh sebanyak 100 orang peserta yang berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, Bank BRI, Bank BJB, Bank Mandiri, PT. Pertani, PT. Bhanda Ghara Reksa, dan pengusaha rotan di Cirebon. Sosialisasi SRG ini menjadi ajang diskusi dan tanya jawab bagi para pelaku usaha rotan di Cirebon.





Penghargaan Investor Awards 2014



Kepala Bappebti, Sutriono Edi didampingi Kepala Biro Perencanaan Bappebti menghadiri acara "Investor Award-Tokoh Finansial Indonesia 2014" yang diselenggarakan oleh Majalah Investor di Jakarta, Rabu (10/12).

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappebti menyerahkan Penghargaan kepada Perusahaan Pialang Berjangka yang meraih Kinerja terbaik.

Acara tersebut dihadiri oleh Menkeu, Bambang Brojonegoro, para pengusaha, CEO Perusahaan BUMN maupun Perbankan serta Dirut Pialang Berjangka.

Kunjungan Delegasi SECC ke Bappebti

Delegasi Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC) yang berjumlah 5 orang mengunjungi Bappebti, 15 Desember 2014. Kunjungan itu mendapat sambutan dari Kepala Bappebti Sutriono Edi yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala Biro Analisis Pasar, dan juga Direktur Utama JFX, Sherman Rana Krishna.

SECC adalah Badan Regulator Kamboja di bidang finansial. Kamboja saat ini belum memiliki pasar perdagangan berjangka komoditi dan ingin merambah perdagangan berjangka sehingga kunjungan mereka adalah dalam rangka studi banding peraturan perundang-undangan terkait perdagangan berjangka komoditi.

Dalam kunjungan ini mereka menyampaikan bahwa pasar perdagangan berjangka Indonesia adalah yang paling cocok untuk mereka pelajari dan diterapkan di Kamboja. Mereka juga ingin adanya hubungan berkelanjutan antara Indonesia dan Kamboja dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.



Menjadi Bursa Kelas Internasional, BKDI Berniat Jual Sahamnya



Saham keluarga Widjaja di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau dikenal Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) rencananya akan dijual kepada pihak lain. Menurut Direktur Utama, Megain Widjaja, keluarganya berencana akan mengurangi saham mayoritas yang

selama ini dimilikinya di BKDI.

"Di antara mereka yang telah menyatakan minatnya untuk membeli saham di BKDI adalah lembaga keuangan asing. Saat ini kami memiliki saham antara 50 % hingga 60 % di BKDI," terang Megain, tanpa memberikan ukuran atau penilaian untuk penjualan saham yang

direncanakan, seperti dikutip Bloomberg, Jumat, 5 Desember lalu.

Sebagai informasi, kakek Megain Widjaja yaitu Eka Tjipta Widjaja memiliki kerajaan bisnis yang mencakup Golden Agri-Resources Ltd (GGR), produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia. Menurut data Bloomberg, dia adalah orang ke-empat terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih diperkirakan US\$5,8 miliar.

"Kami ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kami ingin membuka pasar untuk pemegang saham yang akan membawa nilai strategis untuk memperluas ICDX ke panggung global," ungkap Megain.

Dia juga menjelaskan, berdasarkan peraturan, perusahaan asing dapat memiliki sebanyak 40 persen dari saham BKDI. "Kami juga terbuka untuk mitra lokal," imbuh Megain Widjaja.

Pembentukan AIPB Molor Hingga 2015

Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka- AIPB yang diamanatkan pada Pasal 44A, UU No. 10 Tahun 2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, semula ditargetkan akan terbentuk pada bulan November 2014 lalu. Namun, tampaknya target yang ditetapkan Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, itu, bakal tidak tercapai setidaknya hingga akhir tahun 2014.

Menurut I Gede Raka Trantra (IGRT), salah satu anggota Tim Formatur, di Jakarta, mengatakan, kami- Tim Formatur baru satu kali melakukan pertemuan dan belum menentukan kriteria bakal calon Ketua AIPB. "Mungkin baru pekan depan kami akan melakukan pertemuan lagi," katanya.

Ditambahkan IGRT, saat ini terdapat sebanyak 20 sponsor terbentuknya AIPB, yang berasal dari industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

"Masing-masing sponsor itu nantinya bisa mengajukan dua nama yang dapat dijadikan bakal calon ketua. Sosok calon ketua yang diajukan pun tidak dibatasi dari industri perdagangan berjangka, melainkan publik figur lainnya pun bisa diajukan,"

jelas IGRT.

Lebih jauh dikatakan IGRT, melihat banyaknya nama yang akan menjadi calon ketua, diperkirakan AIPB baru akan terbentuk di awal tahun 2015 mendatang.

Di samping itu dijelaskan IGRT, Tim Formatur akan bertugas melakukan *fit and proper test* sesuai kriteria yang akan ditetapkan. Sedangkan Tim Formatur terdiri dari sebanyak tujuh tokoh, dan lima diantaranya pernah bertugas di Bappebti. Seperti mantan Kepala Bappebti, Ardiansyah Parman, mantan Sekretaris Bappebti, Eddy Suseno, mantan pejabat Bappebti, Syahnil, Chrisnawan Triwahyuardhianto dan IGRT. Selain itu, juga terdapat dua tokoh dari unsur pelaku industri perdagangan berjangka yang berasal dua bursa berjangka di Indonesia.

"Kita sangat berharap AIPB segera bisa terbentuk sehingga integritas industri perdagangan berjangka diperhitungkan dunia usaha lain. Dan bisa mengembangkan industri ini sesuai amanat undang-undang, sebagai sarana pemebentukan harga dan manajemen risiko," tandas IGRT.

JFX Center Hadir di UKWK

Jakarta Futures Exchange (JFX) menjalin kerjasama dengan Universitas Katolik Widya Karya (UKWK), Malang, serta Perusahaan Pialang Berjangka, PT Agrodana Futures, dalam rangka pengembangan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia, khususnya di kota Malang. Kerjasama tersebut dilakukan melalui edukasi, sosialisasi dan memasyarakatkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di lingkungan kampus melalui wadah JFX Center.

Sherman Rana Krishna, mengatakan, pembentukan JFX Center ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab BBJ dalam mensosialisasikan PBK di Indonesia sesuai dengan amanat UU No.10/2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang merupakan amandemen UU No.32/1997. "Kami ingin mengenalkan perdagangan berjangka komoditi sedini mungkin kepada masyarakat sehingga kami memandang perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa dalam bentuk JFX Center," kata Sherman, dalam keterangan persnya Senin, 8 Desember 2014.

Sementara itu Rektor Universitas Widya Karya, Rm. M. Agung Christiputra menjelaskan, Kampus Widya Karya menyambut baik dan mendukung keberadaan JFX Center ini. "JFX Center penting sebagai pusat kegiatan ilmiah, informasi, dan edukasi sekaligus entrepreneurship di bidang Perdagangan Berjangka



Komoditi bagi para mahasiswa dan civitas academica lainnya," papar Agung.

Sherman juga menjelaskan, Indonesia merupakan produsen utama komoditi dunia seperti CPO, Batubara, Kopi, Kakao, Timah dan Emas. Namun saat ini harga komoditi utama dunia tersebut tidak ditentukan oleh Indonesia. "Oleh karena itu, Indonesia sudah selayaknya menjadi referensi harga komoditi utama dunia yang terbentuk melalui Bursa Berjangka. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan kelak dapat mendorong hal tersebut tercapai," kata Sherman Rana Kreshna. 

Juni 2016 ITRC Bentuk Pasar Fisik Karet

Negara-negara produsen karet dunia sepakat meningkatkan harga karet di pasar internasional dengan berbagai cara. Salah satu kesepakatan yang diputuskan pada pertemuan tingkat Menteri [International Tripartite Rubber Council](#) - ITRC, yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan lalu (Kamis, 20-11-2014), yakni di masing-masing anggota dibentuk pasar fisik terorganisir komoditi karet.

Dibentuknya pasar fisik karet di negara-negara produsen tersebut merupakan rekomendasi lembaga konsultan yang ditunjuk ITRC. Direncanakan pada akhir tahun 2014 ini, pihak konsultan akan lakukan presentasi pembentukan pasar fisik karet yang dimaksud. Demikian antara lain dikatakan Kepala Bagian Pengembangan Pasar, Biro Analisis, Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, baru-baru ini kepada Redaksi Buletin Bappebti.

"Dalam pertemuan ITRC itu, sudah disepakati dalam 18 bulan ke depan (terhitung dari pertemuan ITRC di Kuala Lumpur), di masing-masing negara akan dibentuk pasar fisik terorganisir karet. Pasar itu nantinya akan menjadi acuan harga berdasarkan negara produsen karet," jelas Dharmayugo.

Jadi kalau kita hitung 18 bulan ke depan, tambah Dharmayugo,

pasar fisik karet akan terbentuk sekitar bulan Juni 2016. "Hingga mencapai Juni 2016, itu bukanlah waktu yang panjang. Itu waktunya cukup mepet. Karena kita harus persiapan segala sesuatunya. Yang paling penting dalam persiapan itu adalah mengedukasi para petani untuk menghasilkan karet standar. Ini pekerjaan yang tidak mudah, karena selama ini para petani memiliki cara tersendiri untuk mengolah karet yang sesuai selera pembeli," ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Dharmayugo, persiapan yang lain adalah mengumpulkan para *buyer*- pembeli. Pasar fisik karet itu akan ada manfaatnya ketika ada peran aktif dari *buyer*. Kalau mereka tidak aktif maka percuma saja ada pasar fisik karet.

"Karena itu menurut pikiran saya, pemerintah perlu mengeluarkan sebuah regulasi agar para pelaku khususnya dari kelompok *buyer*, terarah melakukan transaksi di pasar fisik karet. Tanpa regulasi seperti itu, negara produsen tidak bisa menentukan harga karet di negaranya sendiri," tandas Dharmayugo Hermansyah.



DMSI Prediksi Harga CPO Lesu Hingga Akhir 2015

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) memperkirakan harga minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) masih akan turun hingga akhir 2015 mendatang. Pasalnya, menurut Ketua Umum DMSI, Derom Bangun, hal tersebut didukung oleh kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi berbarengan dengan harga minyak dunia yang merosot. "Sekarang harga minyak bumi melorot sampai US\$ 70 per ton, maka minyak sawit juga ikut kena dampak," katanya belum lama ini.

Sebelum terjadi kenaikan harga BBM di dalam negeri, lanjutnya, ada harapan bahwa akhir 2014 harganya akan kembali naik. Kesimpulan tersebut, kata Derom, setelah pihaknya melakukan diskusi dengan para anggota dewan antarnegara. Namun ternyata perkiraan tersebut meleset sehingga kecil harapan harga minyak sawit naik dalam waktu dekat.

Lebih lanjut dikatakannya, jika sebelumnya berada pada harga Rp 10 ribu per kg, maka sekarang sudah seharga Rp 7 ribu per kg. Dampaknya, penjualan turun dan penerimaan perusahaan dan petani ikut turun. Saat ini, ungkapnya, industri hilir minyak sawit pun jadi susah. "Karena ada pengurangan pendapatan, pengusaha harusnya lebih bisa melakukan efisiensi."

Melihat situasi tersebut, dia meminta pemerintah agar mengemukakan kebijakan dan peraturan, khususnya dalam pemakaian minyak sawit untuk biodiesel. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sebenarnya telah mewajibkan penggunaan biodiesel tersebut sebanyak 10 persen, namun dia heran ketentuan tersebut sampai detik ini belum terlaksana.

Padahal, jika ketentuan tersebut dijalankan, pada 2014 biodiesel yang harusnya terpakai yakni sebanyak 3 juta kilo liter. Asumsinya, pengangkutan di Indonesia yang menggunakan solar sebanyak 33 juta kilo liter. Maka, sepuluh persennya yakni 3 juta liter atau sekitar 2,6 juta ton CPO. "Di tahun 2015, pelaksanaannya mesti didorong dan diawasi," pungkas Derom Bangun. 

AETI Proyeksikan Harga Timah 2015 Dikisaran US\$21.500

Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) memprediksi harga rata-rata timah di dalam negeri untuk tahun 2015 berada dikisaran US\$21.500 per metrik ton.

"Timah sebagai salah satu komoditi strategis dunia, pergerakan harganya pasti akan mengalami pasang surut. Pergerakan harga timah itu akan dipengaruhi dengan perkembangan perekonomian dari negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok," jelas Ketua AETI, Jabin Sufianto, beberapa waktu lalu.

Dengan mempertimbangkan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara-negara industri tersebut, tambah Jabin, dan dibandingkan dengan suplai timah, maka bisa diprediksi harga timah di dalam negeri berkisar US\$ 21.500 per metrik ton.

"Memang ada pengetatan ekspor timah dari Indonesia dengan berlakunya Permendag No. 44 Tahun 2014. Seharusnya dengan pengetatan ekspor itu harga timah bisa lebih tinggi, tetapi faktor lain yang membuat harga timah tertekan adalah munculnya Myanmar sebagai produsen dan eksportir timah," kata Jabin.

Lebih jauh dikatakannya, munculnya Myanmar sebagai produsen dan eksportir timah membuat kita terkaget-kaget. Karena selama ini belum pernah ada riset seberapa besar potensi dan kualitas timah dari Myanmar.

"Beberapa waktu lalu dalam sebuah pertemuan internasional kalangan industri timah, sebenarnya ada perkiraan harga timah di tahun 2015 berkisar US\$ 23.000 per metrik ton. Tetapi perkiraan itu kemudian terpatahkan dikarenakan Myanmar memasok timah ke pasar internasional. Sepanjang tahun 2014 ini, diperkirakan Myanmar mengeksport timah sekitar 20.000 ton, sedangkan konsumsi dunia berkisar 300.000 metrik ton," terang Jabin Sufianto. 

Mencapai Swasembada Gula Perlu 15 Pabrik

Sejak dicanangkan sejak 1999, Indonesia tak kunjung swasembada gula. Namun pemerintah baru menargetkan bisa membangun 10-15 pabrik gula baru untuk mencapai swasembada. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengatakan, kalau mau swasembada gula masing-masing kapasitas pabrik gula tersebut harus mencapai 200.000-300.000 ton per tahun. "Kebutuhan gula kita harus ada 10-15 pabrik," kata Panggah, baru-baru ini. Untuk membangun pabrik gula baru tersebut, maka memerlukan tambahan lahan perkebunan tebu sebanyak ratusan hektar, dari saat ini sebanyak 430.000 hektar. "Selama ini target swasembada gula

tak tercapai karena persoalan lahan yang sulit tersedia." "Persoalannya lahannya ada nggak? Kalau lahan ada kita siap untuk investasi, teman-teman dari rafinasi itu siap. Kalau ada lahan untuk kebutuhan 10-15 pabrik. Masalah lahan ini tidak di perindustrian," ujar Panggah. Menurut hitungan Panggah, kebutuhan gula untuk industri kini berkisar di angka 2,8 juta ton hingga 3 juta ton per tahun, dan kebutuhan untuk konsumsi (rumah tangga dan umum) mencapai 2,4 juta sampai 2,5 juta ton per tahun. "Jadi untuk memenuhi 5,3 juta ton sampai 5,4 juta ton gula di dalam negeri tak akan mampu dicukupi, karena itu terpaksa harus impor," ujar Panggah Susanto. 



Coftra, OJK and Bank of Indonesia discuss Futures Country Debenture

Coftra had held a meeting with Financial service Authority- OJK and Bank of Indonesia- BI to accomplish futures country debenture product. The meeting was held to synchronize the perception of these three state institutions on the product. Coftra head Analysis Bureau, Mardjoko, said meanwhile waiting for the meeting, Coftra also asked Jakarta Futures Exchange – JFK and PT Kliring Berjangka Indonesia – KBI to prepare the surveillance system.

“This product will trade government securities which means that it will bring country’s good name therefore a good system for this product needs to be created. Once the product has been confirmed by the authority, the exchanges will run the product accordingly,” Mardjoko said recently.

In this futures country debenture product, we will trade the debenture tenor. The exchanges will give reference on the variety of credible and high demanded debenture tenor by referring to prior demand and recent market condition. Then the futures country debenture will be traded on the specific time and price that has been determined on exchanges.

It was said by Mardjoko, the futures country debenture product that will be traded eventually is country debenture with short period tenor approximately one to five years and was presumed as highly demanded by investor who wants profit on a short time.

“To finalize the surveillance system for this futures country debenture product, JFK and KBI will hold a comparative study to Singapore to review their futures financial products,” Mardjoko added. 

ICDX gathered with ESDM Ministry Develop the Mining and Coal Contract

The success of of Indonesian Commodity & Derivatives Exchanges- ICDX on presenting the domestic Tin Exchanges in August 2013 has become a proof to Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) to develop the mining commodity physical trading. In the coming year of 2015, BDKI is planning to trade the nickel, bauxite and other mineral commodities that have wide market but have not yet been traded at other country.

“We will coordinate with the ESDM Ministry, especially Mineral and Coal Directorate-General to create mining commodity market such as nickel and bauxite in the country. The Mineral mining commodity is very potential for Indonesia to make a strong competitiveness and improve our country foreign exchange,” President Director of ICDX, Megain Widjaja said on recent occasion.

Once the current government has intention to create competitiveness at international market and improve revenue from Mineral mining sector, I think that it is the time for us to create market domestically.

It was said by Megain Widjaja that to create domestic mining commodity market of Mineral and Coal, we should have a strong commitment from all stockholders and if we would like to export it, it should be traded via exchanges.

“If there is no element of liability to trade via exchanges, there will be no domestic market until the end. Actually, the sentence of “liable to trade via exchanges” should not be seen only from negative point of view but also from the positive side, which is to create a transparant and fair market. Besides that, we have data and price referral therefore the exported mining commodity has a clear history and can give revenue for the country,” Megain Widjaja emphasized. 

JFX Will Launch New Logo on their 14th Anniversary

Jakarta Futures Exchange (JFX) will launch new logo on their 14th anniversary of JFX’s operation on 15th of December this year. According to President Director of JFX, Sherman Rana Kreshna, the logo changes is done to boost the spirit and give new image for JFX headway in the future.

“Today is not JFX’s anniversary, but it’s the first day of trading. Coincide with this event, we changed JFX logo become company new logo which is more dynamic, modern and describe a continued moving forward venture company,” Sherman explained on Press conference of 14th year JFX operation and New Logo official announcement at JFX’s office, Jakarta on Monday 15th of December 2014

Moreover he said that the new logo is based on the spirit of modernization dynamics, lots of companies have changed their logo to give enlightenment.

“The gold line is symbolizes innovation, the yellow colour itself has a meaning of prosperity in philosophy. While the arrow sign symbol on golden X symbol can be translated as the power for a more dynamic and innovative moving forward. Therefore we hope that we will move forward to the success,” Sherman Rana Kreshna said. 



PENERBITAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2014

		Penerbitan				
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. Pertani (Persero)					
	- Sidrap (Maritengae)	Gabah	4	646	4.500	2.905.875.000
	- Pinrang (Watang Sawito)	Gabah	2	310	4.500	1.395.225.000
2.	PT. BGR (Persero)					
	- Aceh Tengah (Bebesan)	Kopi	1	5	40.000	204.000.000
3.	Koperasi Niaga Mukti					
	- Cianjur (Warungkondang)	Gabah	4	105	6.242	657.260.000
4.	PT. Pos Indonesia (Persero)					
	- Tasikmalaya (Jamanis)	Gabah	4	50	5.000	250.000.000
5.	KUD Tuntung Pandang					
	- Barito Kuala (Marabahan)	Gabah	6	67	6.000	404.706.000
Jumlah		Gabah	20	1179	5.248	5.613.066.000
Total		Kopi	1	5	40.000	204.000.000
			21	1.184		5.817.066.000

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2014

		Penerbitan			Pembiayaan		
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. Pertani (Persero)						
	- Sidrap (Maritengae)	Gabah	4	646	3	1.570.000.000	BRI
	- Pinrang (Watang Sawito)	Gabah	2	310	2	950.000.000	BRI
2.	PT. BGR (Persero)						
	- Aceh Tengah (Bebesan)	Kopi	1	5	-	-	-
3.	Koperasi Niaga Mukti						
	- Cianjur (Warungkondang)	Gabah	4	105	4	459.602.000	Bank BJB
4.	PT. Pos Indonesia (Persero)						
	- Tasikmalaya (Jamanis)	Gabah	4	50	-	-	-
5.	KUD Tuntung Pandang						
	- Barito Kuala (Marabahan)	Gabah	6	67	5	254.000.000	Bank Kalsel
Jumlah		Gabah	20	1179	14	3.233.602.000	
Total		Kopi	1	5	0	-	
			21	1.184	14	3.233.602.000	

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG BULAN OKTOBER 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode Oktober 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi Oktober 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-Oktober 2014 (Rp.)
1.	Sumatera Barat	496.230.500	496.230.500	17.975.973.000
2.	Jambi	3.990.200.000	3.990.200.000	16.222.441.000
3.	Lampung	3.940.600.000	3.940.600.000	8.939.200.000
4.	Jawa Barat	6.897.000.000	6.897.000.000	61.550.855.000
5.	Jawa Tengah	3.432.500.000	3.432.500.000	93.409.115.000
6.	Yogyakarta	6.255.500.000	6.255.500.000	77.167.200.000
7.	Jawa Timur	20.785.000.000	20.785.000.000	167.217.650.000
8.	Bali	600.000.000	600.000.000	7.435.437.500
9.	NTB	1.483.400.000	1.483.400.000	29.557.825.000
10.	Sulawesi Utara	15.107.234.000	15.107.234.000	84.817.159.000
11.	Sulawesi Selatan	12.589.500.000	12.589.500.000	38.305.850.000
12.	Sulawesi Tenggara	1.049.936.000	1.049.936.000	13.422.461.000
13.	Gorontalo	Nihil	Nihil	6.899.600.000
14.	DKI	Nihil	Nihil	7.418.500.000
15.	PT iPASAR Indonesia	Nihil	Nihil	130.000.000
16.	Pasar Fisik CPO	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL		76.627.100.500	90.215.997.000	630.469.266.500

Sumber: Bappebti

PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT PERIODE SEPTEMBER 2014

Komoditas	Penawaran Oktober 2014	Transaksi Januari - Okt 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	522.000 Kg	40.000 Kg	130.000.000
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	84.000 Kg	0	0
Gondorukem	2.131 Ton	0	0
TOTAL NILAI TRANSAKSI			130.000.000

Sumber: PT iPASAR, data diolah

Subjek Kontrak Berjangka

Pengantar Redaksi

Undang-undang No. 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyempurnakan Undang-undang No. 32 Tahun 1997, antara lain mengubah definisi komoditi sebagai subjek perdagangan berjangka. Dengan adanya perubahan itu, maka subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan oleh Bursa Berjangka bisa dalam bentuk *tangible* atau pun *intangible*.

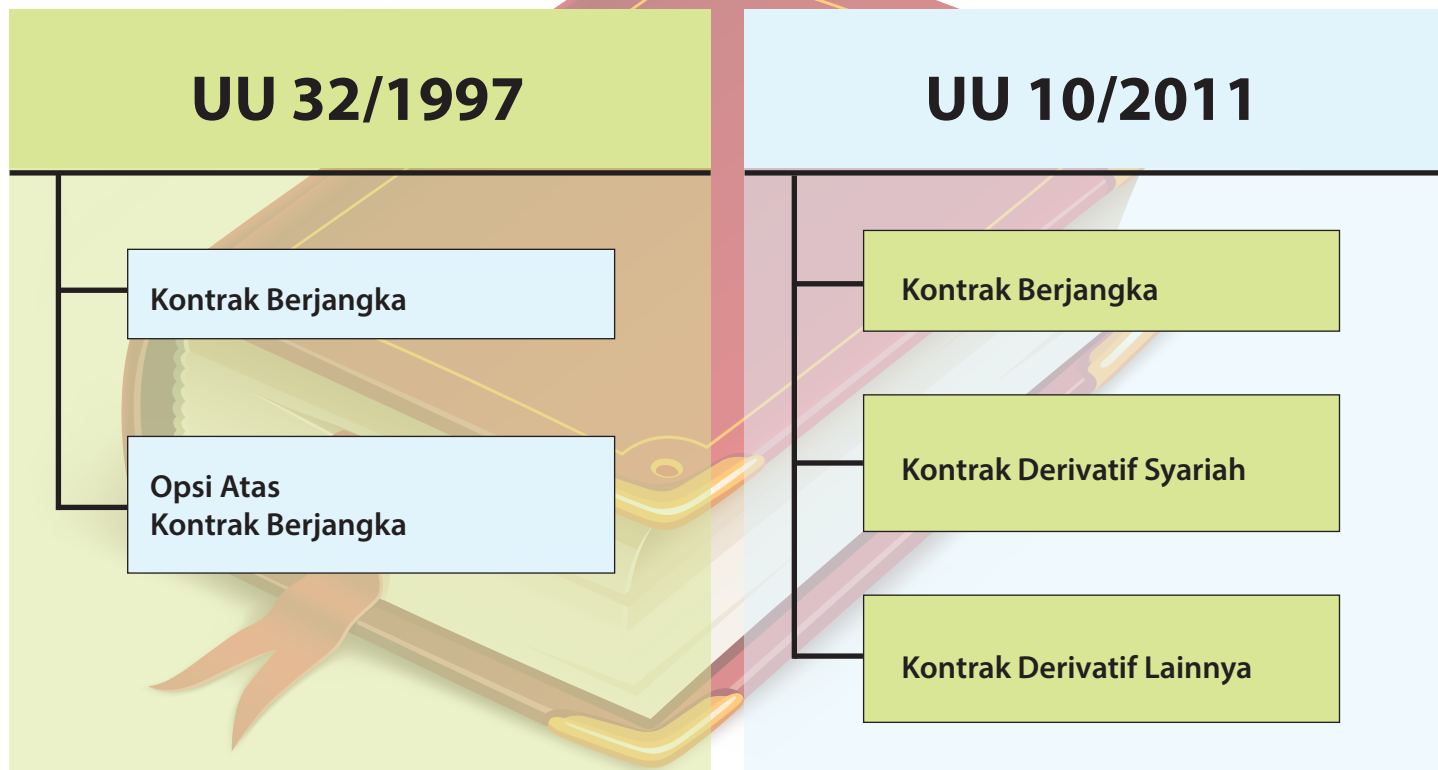
Di sisi lain dari perubahan definisi komoditi sebagai subjek kontrak berjangka berdampak pada penambahan jenis kontrak berjangka seperti kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya. Yang dimaksud dengan kontrak derivatif lainnya seperti kontrak berjangka yang diperdagangkan di luar bursa. Di

kalangan industri perdagangan berjangka internasional, kontrak berjangka di luar bursa menawarkan seperti kontrak indeks, *forex*, *option*, suku bunga dan lainnya.

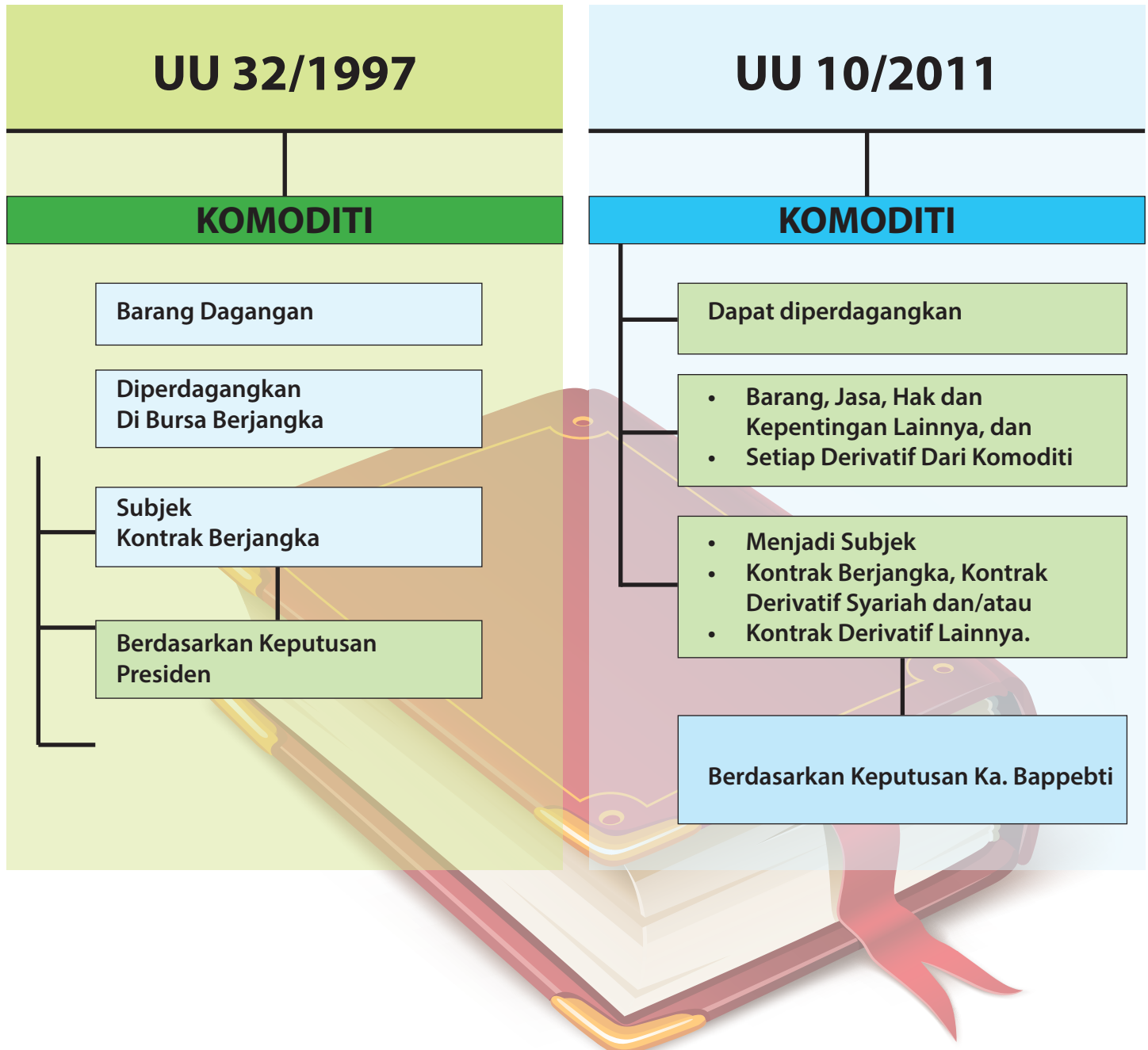
Sementara itu, penyempurnaan payung hukum perdagangan berjangka komoditi juga memangkas kewenangan institusi yang mengeluarkan izin kontrak berjangka komoditi. Jika semula sebuah subjek kontrak berjangka ditetapkan melalui Keputusan Presiden, maka menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2011, cukup ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Bappebti.

Berikut ini pengembangan undang-undang perdagangan berjangka berdasarkan UU No.10 Tahun 2011;

KONTRAK YANG DIPERDAGANGKAN



KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK PERDAGANGAN BERJANGKA



Optimalisasi Gudang SRG Untuk Pengembangan PBK

Dalam setiap kegiatan perdagangan, fungsi tempat penyimpanan (gudang) merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat efisiensi suatu 'pasar'. Gudang didesain untuk selalu dekat dengan aktivitas perdagangan, setidaknya ada sarana-prasarana yang mempermudah akses antara pasar dan gudang.



Tempat terjadinya perdagangan fisik dikenal dengan istilah pasar, sedangkan tempat seperti 'pasar' dalam perdagangan berjangka dikenal dengan istilah 'bursa'. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, perdagangan fisik dan perdagangan berjangka pada prinsipnya membutuhkan sarana/ prasarana yang sama untuk dapat mendukung terjadinya transaksi yang efisien. Sarana/ prasarana yang dibutuhkan tersebut antara lain sistem informasi harga. Sistem informasi harga membutuhkan jumlah supply dan demand pada waktu tertentu dari masing-masing pelaku pasar, baik kualitas maupun kuantitas dari komoditi yang diperdagangkan.

Informasi mengenai kualitas dan kuantitas komoditi yang diperdagangkan tidak cukup hanya mengandalkan volume komoditi yang diperdagangkan di pasar

saja. Para pelaku pasar juga membutuhkan data mengenai persediaan komoditi di tempat penyimpanan maupun data komoditi yang dapat mensubstitusi komoditi tersebut. Untuk pasokan yang tidak tersedia di pasar, melainkan di tempat-tempat penyimpanan, maka data komoditi yang disajikan harus terlebih dulu diverifikasi kebenarannya oleh pihak independen.

Meskipun tidak semua volume tersebut ditransaksikan di bursa, namun data tersebut sangat menentukan pembentukan harga di bursa yang mengikuti mekanisme *supply and demand*. Verifikasi terhadap keabsahan data tersebut menjadi krusial mengingat para pelaku pasar dalam perdagangan berjangka tidak berinteraksi secara langsung.

Oleh karena itu, untuk dapat mendukung perdagangan di bursa berjang-

ka, tidak cukup hanya mengembangkan pasar fisik tetapi gudang sebagai tempat penyimpanan juga memainkan peranan penting. Sebab, pasar fisik adalah pasar yang dijadikan acuan harga- *underlying market* dalam pembentukan harga komoditi di bursa berjangka.

Fungsi gudang dalam perdagangan berjangka tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan komoditi, namun juga merupakan basis data dalam menentukan ketersediaan volume komoditi yang berpengaruh dalam pembentukan harga di bursa berjangka. Upaya penataan gudang dilakukan dengan membuat gudang terdaftar yang memenuhi persyaratan tertentu yang dikenal dengan Sistem Resi Gudang (SRG). SRG diatur berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, tentang Sis-



tem Resi Gudang.

Mengacu artikel yang ditulis oleh Peneliti Utama PSEKP, Badan Litbang Pertanian, Erwidodo, pada sebuah media massa (3 Oktober 2014), selain menjaga harga di tingkat produsen, SRG juga berperan mengurangi instabilitas harga produk pertanian. Terkait dengan hasil penelitian tersebut, peran SRG dimaksud dapat membantu pengembangan bursa berjangka dalam upaya mencegah adanya 'fraud' oleh para pelaku bursa dan menjamin kepastian dalam proses serah fisik.

Mencegah Fraud

Sebagaimana diketahui, untuk mencegah terjadinya manipulasi harga dalam perdagangan berjangka, para pelaku pasar dikenai aturan batas kepemilikan posisi- *limit position*. Pelaku tidak boleh mengambil posisi (volume perdagangan) yang lebih besar dari ketentuan yang dimuat dalam kontrak berjangka. Pelaku hanya dapat mengambil posisi yang melebihi ketentuan jika memiliki volume dengan posisi yang berbeda di pasar fisik atau dikenal dengan istilah *bonafide hedge*. Sebagai contoh, jika di bursa berjangka memegang posisi beli maka di pasar fisik harus memegang posisi jual. Dengan demikian tidak ada peluang bagi pemegang posisi dominan dalam perdagangan berjangka untuk mengatur pembentukan harga di bursa- *price discovery*. Alat untuk mengontrol batas kepemilikan posisi itu antara lain dapat dibantu dengan adanya data yang terdapat dalam gudang SRG. Karena, gudang SRG dapat mencegah instabilitas harga yang disebabkan oleh 'permainan' para pemegang posisi dominan untuk kepentingannya sendiri, sehingga bursa tidak lagi mengikuti mekanisme pasar yang sehat.

Kepastian Serah Fisik

Gudang merupakan salah satu infrastruktur yang membantu penyelesaian kontrak berjangka jika dibutuhkan. Gudang yang sudah terdaftar

di bursa berjangka merupakan salah satu lokasi penyerahan dalam penyelesaian kontrak berjangka yang ditutup melalui serah terima fisik. Sedangkan gudang yang tidak terdaftar dapat dijadikan salah satu alternatif bagi penyelesaian kontrak berjangka dengan mekanisme tukar fisik berjangka- *exchange futures for physical*.

Semakin banyak alternatif yang disediakan bursa berjangka dalam penyelesaian kontrak berjangka, maka perdagangan tersebut akan semakin diminati. Tingginya minat pelaku pasar dapat meningkatkan likuiditas perdagangan di bursa. Perdagangan yang likuid akan menumbuhkan kepercayaan para stakeholders dan mengembangkan bursa. Bursa yang berkembang pesat akan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan yang dapat memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli sekaligus (*win win solution*).

Dengan demikian, gudang memainkan peranan penting dalam mengembangkan perdagangan di bursa berjangka. Oleh karena itu pembenahan sektor pergudangan merupakan salah satu upaya yang perlu diambil dalam mengembangkan perdagangan berjangka. Dengan adanya gudang, para pelaku pasar yang bertransaksi akan lebih terjamin karena adanya kepastian ketersediaan barang. Lalu lintas perdagangan menjadi lebih terpantau jika data yang dimiliki oleh gudang dapat terhubung dengan baik, antara sesama pemilik gudang maupun bursa berjangka selaku otoritas dalam perdagangan berjangka.

Perkuat Pasar Fisik

Pasar fisik yang representatif sangat dibutuhkan dalam mengembangkan perdagangan berjangka. Pasar fisik yang menjadi acuan perdagangan berjangka sebaiknya merupakan pasar yang tidak mudah 'diganggu'. Gangguan tersebut antara lain dikenal dengan menahan distribusi barang, sehingga mengakibatkan kelangkaan dan harganya pun meningkat. Gangguan

seperti itu pada masa orde baru disebut sabotase jika terjadi pada distribusi kebutuhan pokok. Karena menurut pemerintah di masa itu, sabotase kebutuhan pokok akan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. (*)

Sabotase antara lain dapat terjadi karena adanya keterbatasan akses informasi dari tempat penyimpanan yang mengakibatkan keterbatasan info mengenai volume komoditi yang diperdagangkan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menahan pasokan komoditi pada waktu tertentu dengan tujuan untuk mengatur harga sehingga merugikan masyarakat luas selaku konsumen. Hal ini dapat mempengaruhi ketahanan pasar fisik.

Melalui SRG, pasar fisik dapat diperkuat untuk mencegah terjadinya tindakan sabotase. Dengan data kepemilikan komoditi yang dikelola secara terintegrasi dalam SRG, perbuatan yang merugikan masyarakat maupun pemerintah tersebut dapat dicegah dan dihentikan. Karena sabotase berbeda dengan spekulasi.

Dengan adanya data gudang yang lengkap, terhubung, dan *real time*, maka kecil kemungkinan perdagangan komoditi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan sesaat. Pasar fisik yang kuat sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam pembentukan harga di bursa berjangka. Demikian pula bursa berjangka yang aktif dapat membantu para pelaku untuk melindungi aktivitas transaksinya di pasar fisik. Gudang dalam hal ini memainkan peran penting untuk menjembatani pasar fisik dengan bursa berjangka.

(*) Pengaturan tentang sabotase ini diatur sebelumnya dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Presiden Republik Indonesia yang kemudian dicabut pada era reformasi. Saat ini sedang diusulkan kembali dalam rancangan perubahan KUHP. ❧ *) Nurlisa Arfani



WPB Millenium Multi Talenta

Vita Nurafni adalah salah satu sosok Wakil Pialang Berjangka WPB dari PT Millenium Penata Futures – MPF Cabang Semarang, yang memiliki multi talenta. Sejak usia dini, Vita demikian dia akrab disapa, sudah mencoba berbagai bidang bisnis mulai dari menawarkan berbagai produk hingga melenggang di atas *cat walk* memamerkan berbagai desain terbaru produk fashion di kota kelahirannya Semarang.

Talenta yang dimiliki Vita itu belum seberapa. Setelah tamat SLTA tahun 2000, Vita melanjutkan kuliah jurusan Kedokteran Hewan di Institut Pertanian Bogor-IPB. Namun kemudian, di tahun 2004 wanita berzodiak Libra ini meneruskan pendidikan S1-nya di Fak. Peternakan, Univ. Diponegoro, Semarang.

“Gak nyambung ya? Sarjana Peternakan menjadi wakil pialang,” celetuk Vita, kelahiran Semarang, 09 Oktober 1981 ini.

Lebih jauh Vita menuturkan, sejak dulu saya sangat menikmati sekolah dan kuliah sambil kerja. “Jenis pekerjaannya apa saja, yang penting menyenangkan di hati dan halal.”

“Setelah menjadi sarjana di tahun 2008, saya mencoba melamar ke MPF sebagai sekretaris yang kebetulan membuka kantor cabang di Semarang. Dan sampai saat ini pun saya masih sekretaris di MPF, tetapi merangkap menjadi wakil pialang,” ucapnya.

Dijelaskan Vita, di MPF ada kebijakan setiap orang berkesempatan menjadi WPB. Hal itu dilakukan agar siapa saja di MPF mampu menjelaskan lebih detail tentang mekanisme perdagangan ber-

jangka komoditi, terhadap calon investor yang kemungkinan mampir ke Kantor Cabang MPF Semarang.

“Karena ada kebijakan itu, di tahun 2011 saya pun mencoba mengikuti tes WPB. Dan bersyukur, sekali mengikuti tes WPB langsung lulus,” kata anak ketiga dari empat bersaudara ini.

Menjadi WPB, ternyata membawanya mengenal berbagai kalangan dengan latar belakang berbeda-beda. Hingga suatu ketika dia pun ditawarkan untuk bermain film televisi- FTV di salah satu stasiun TV swasta. “Mungkin karena saya dianggap mampu melakonkan peran yang ditawarkan, penawaran untuk bermain film di layar lebar pun berdatangan. Tetapi saya dengan halus menolaknya. Sebab setelah saya pikir-pikir, menjadi aktris film perlu fokus. Sedangkan saya lebih menyukai



berkarir di sektor formal seperti di MPF, ini."

"Tetapi kalau ada penawaran menjadi model iklan, saya masih bisa menerimanya. Sebab masa produksinya tidak terlalu lama, jadi saya pun tetap bisa menjalankan tugas saya di MPF. Sampai saat ini saya sudah menjadi model iklan dari empat produk. Hasilnya sih lumayan. Tetapi itu sifatnya dadakan, tidak bisa terus menerus," ujar Vita.

Talenta yang dimiliki Vita Nurafni belum berhenti di situ. Dengan modal sebagai model dari berbagai produk *fashion*, dia pun mampu mendesain berbagai jenis *fashion*.

"Batik yang saya pakai ini adalah salah satu hasil karya saya. Tetapi saya hanya bisa mendesain, sedangkan untuk menjahitnya saya serahkan ke teman yang

sudah menjadi langganan saya menjahit. Mendesain *fashion* itu, saya otodidak 'loh," katanya dengan nada bangga.

Atas saran dari berbagai teman, tambahnya, saya pun diminta untuk memajang hasil desain saya melalui *online shop*. "Bisnis *online shop* ini lah yang saat ini sedang saya kerjakan."

"Karena saya menyukai kain batik, maka desain batik 'lah yang saya coba eksplor. Jadi kalau ada waktu senggang seperti hari Sabtu-Minggu, saya pasti *hunting* ke berbagai kota untuk mencari motif batik yang bisa didesain menjadi *fashion*," kata Vita bersemangat.

Nah, bicara soal perdagangan jangka komoditi, pemilik bibir tipis ini pun tak kalah ketinggalan. Dikatakannya, MPF Cabang Semarang cukup mendapat kepercayaan dari kalangan investor. "Sebelum seorang investor siap melakukan transaksi, kami di MPF pasti akan memberikan edukasi dan sosialisasi. Di samping itu, mereka juga dibekali berbagai informasi sehingga investor bisa memutuskan sendiri *trading*-nya," papar Vita.

"Upaya edukasi dan sosialisasi yang kami dilakukan itu, terbukti tidak ada masalah dengan investor sampai saat ini. Jadi investor pun *trust* kepada MPF," tambahnya.

Berkat kemampuan Vita Nurafni sebagai model dari berbagai produk, manajemen MPF Kantor Cabang Semarang, pun, tak mau kehilangan kesempatan. Vita juga diminta sebagai model kontrak komoditi emas yang ditawarkan MPF. Dan iklan MPF itu saat ini terpasang di salah satu sudut strategis Kota Semarang, Kudus dan Demak.

"*Suer*, saya suka rela menjadi model MPF. Dan saya tidak meminta bayaran ke manajemen. Itu bentuk dedikasi dan loyalitas saya terhadap perusahaan," tutup Vita Nurafni. 





Selamat Natal

&
Tahun Baru

2015

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - BAPPEBTI
www.bappebti.go.id